

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Myanmar terhadap Resolusi Kepatuhan dan Penegakan Hukum 11.3 CITES dalam kerja samanya dengan Tiongkok terkait isu perdagangan satwa liar ilegal dikategorikan sebagai *good faith non-compliance*. Ketidakepatuhan Myanmar tersebut terjadi bukan karena disengaja untuk menolak dan melanggar rezim internasional, melainkan karena adanya faktor-faktor seperti keterbatasan kapasitas, hambatan struktural, konflik internal, serta dinamika politik domestik. Meskipun implementasi kerja samanya sesuai dengan tiga indikator kepatuhan, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*, namun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi, pengawasan yang lemah di wilayah rawan, serta adanya dinamika politik domestik, yang menyebabkan tujuan kerja sama tidak tercapai secara optimal. Program implementasi kerja samanya juga sejalan dengan sejumlah mandat dalam Resolusi Kepatuhan dan Penegakan Hukum 11.3 CITES, namun kepatuhan yang ditunjukkan tersebut belum mencakup sebelas mandat yang ada, melainkan hanya memenuhi tiga dari seluruh mandat. Selain itu, perdagangan satwa liar ilegal antara Myanmar dan Tiongkok masih terus berlangsung setiap tahunnya dan belum sepenuhnya teratasi meskipun sudah ada mekanisme kerja sama yang berkelanjutan. Meskipun demikian, Myanmar telah menunjukkan adanya itikad baik dalam komitmennya terhadap rezim internasional

melalui pembentukan mekanisme koordinasi antarlembaga, berpartisipasi dalam kerja sama internasional, serta pelaksanaan program kerja sama sebagai upaya memerangi perdagangan satwa liar ilegal sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang tetap menjadi tantangan berkelanjutan, khususnya di perbatasan Myanmar dan Tiongkok. Oleh karena itu, kepatuhan Myanmar dikategorikan sebagai *good faith non-compliance* karena meskipun kasus perdagangan satwa liar ilegal masih terus terjadi, namun Myanmar sudah berupaya untuk memenuhi komitmennya terhadap rezim internasional yang ada dengan keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan dinamika politik domestik.

4.2 Saran

Penelitian ini telah menganalisis mengenai tingkat kepatuhan Myanmar terhadap rezim internasional, yaitu CITES, dalam kerja samanya dengan Tiongkok dalam menangani perdagangan satwa liar ilegal di perbatasan Myanmar-Tiongkok. Sehingga menunjukkan bahwa rezim internasional memiliki peran yang penting dalam membentuk kepatuhan dan mendorong keberlangsungan kerja sama antaraktor negara. Dari temuan analisis tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis yang lebih luas mengenai kepatuhan terhadap rezim internasional, misalnya dengan mengkaji kerja sama yang melibatkan aktor internasional non-negara. Keragaman aktor yang diteliti tersebut akan memberikan hasil temuan yang baru, yang memungkinkan adanya pola, sudut pandang, dan kategori kepatuhan yang berbeda dari penelitian ini, yang berfokus pada hubungan antarnegara. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan perspektif yang berbeda dalam melihat bagaimana interaksi, pola komunikasi, dan tingkat

kepercayaan antaraktor dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap rezim internasional. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, pemahaman tentang dinamika kepatuhan terhadap rezim internasional dalam kerja sama internasional akan menjadi lebih luas dan mendalam.